

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Bagian ini yang berisi tentang hasil yang berhubungan dengan akuntabilitas dan pengelolaan keuangan dipondok pesantren sebagai dasar untuk melengkapi teori yang ada, hasil penelitian terdahulu berkaitan dengan masalah yang dihadapi:

Akuntabilitas merupakan salah satu unsur pokok perwujudan *good governance* yang saat ini sedang diupayakan di Indonesia. Pemerintah diminta untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menilai apakah pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien dan efektif. Akuntabilitas dapat dilihat dari perspektif akuntansi, perspektif fungsional dan perspektif sistem akuntabilitas. Beberapa teknik yang dikembangkan untuk memperkuat sistem akuntabilitas sangat dipengaruhi oleh metode yang banyak dipakai dalam akuntansi, manajemen dan riset seperti *management by objectives*, anggaran kinerja, riset operasi. Pengukuran kinerja dikelompokkan dalam tiga kategori indikator, yaitu (1) indikator pengukuran *service efforts*, (2) indikator pengukuran *service accomplishment*, dan (3) indikator yang menghubungkan antara *efforts* dengan *accomplishment*. Di samping itu perlu disampaikan juga penjelasan tambahan berkaitan dengan pelaporan kinerja ini (Sadjiarto 2000).

Simanjuntak dan Mukhtar (2010) dengan judul “Akuntansi Dan Pengelolaan Keuangan Di Masjid (Sebuah Studi Kasus)”, Berdasarkan penelitian yang dilakukan tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam Konteks konstruksi budaya Masjid Baitusalam, akuntansi dapat diterima dengan baik sebagai instrumen yang penting bagi pengelolaan masjid sebagai bentuk perwujudan kejujuran dan pertanggungjawaban. Namun, argumentasi akuntansi merupakan bagian integral dari pemahaman teologi Islam yang dapat memperbaiki kualitas ibadah sebagai muslim justru dibangun oleh landasan penggunaan akuntansi untuk menjaga kehormatan, nama baik, dan citra kepemimpinan para pengurus DKM Masjid sebagai orang-orang yang memiliki tingkat spiritual yang lebih baik dibandingkan masyarakat awam lainnya.

2. Laporan keuangan masjid dilakukan sangat sederhana. Dengan bentuk, empat kolom yakni uraian, penerimaan, pengeluaran dan saldo. Pelaporannya tidak dilakukan secara konsisten dan periodik. Dengan konstruksi kebudayaan yang unik di Masjid Baitusalam, sejati akuntansi dalam prakteknya mendorong transparansi dan akuntabilitas bergeser menjadi instrument yang mendorong perilaku ibadah yang “ria”. Konstruksi kebudayaan masyarakat Ketapang dimana masjid Baitusalam berada, melahirkan “Dilema transparansi dan akuntabilitas”, yang menuntun pendekatan akuntansi yang khas dalam rangka mendorong perubahan konstruksi budaya tersebut untuk menjawab “Dilema transparansi dan akuntabilitas” yang hadir.

3. *Clash Jurisdictional* tidak terjadi pada kasus Masjid Baitusalam, justru ustadz, agamawan yang mengelola masjid mendorong dan menginginkan kehadiran profesi akuntan untuk mendisain penggunaan akuntansi yang baik dan benar dalam pengelolaan keuangan masjid agar dapat membantu perbaikan kinerja masjid dalam melakukan peran-peran dakwah dan pembangunan konstruksi social

ditengah masyarakat Islam. Namun, persepsi individu akuntan yang berpikir sebagai akuntan mainstream yang kebanyakan yang tertarik mengembangkan diri dan akuntansi pada domain entitas mainstream yakni entitas komersial menjadi barrier pengembangan akuntansi pada entitas akuntansi yakni masjid.

Simanjuntak dan Januarsari (2011) dengan judul “Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid” dengan perumusan masalah Bagaimana praktik akuntansi dan pengelolaan keuangan dilakukan oleh para pengurus Masjid ?

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam Konteks konstruksi budaya Masjid Baitusalam, akuntansi dapat diterima dengan baik sebagai instrumen yang penting bagi pengelolaan masjid sebagai bentuk perwujudan kejujuran dan pertanggungjawaban. Namun, argumentasi akuntansi merupakan bagian integral dari pemahaman teologi Islam yang dapat memperbaiki kualitas ibadah sebagai muslim justru dibangun oleh landasan penggunaan akuntansi untuk menjaga kehormatan, nama baik, dan citra kepemimpinan para pengurus DKM Masjid sebagai orang-orang yang memiliki tingkat spiritual yang lebih baik dibandingkan masyarakat awam lainnya.
2. Laporan keuangan masjid dilakukan sangat sederhana. Dengan bentuk, empat kolom yakni uraian, penerimaan, pengeluaran dan saldo. Pelaporannya tidak dilakukan secara konsisten dan periodik. Dengan konstruksi kebudayaan yang unik di Masjid Baitusalam, sejati akuntansi dalam prakteknya mendorong transparansi dan akuntabilitas bergeser menjadi instrument yang mendorong perilaku ibadah yang “ria”. Konstruksi kebudayaan masyarakat Ketapang dimana

masjid Baitusalam berada, melahirkan “Dilema transparansi dan akuntabilitas”, yang menuntun pendekatan akuntansi yang khas dalam rangka mendorong perubahan konstruksi budaya tersebut untuk menjawab “Dilema transparansi dan akuntabilitas” yang hadir.

3. *Clash Jurisdictional* tidak terjadi pada kasus Masjid Baitusalam, justru ustadz, agamawan yang mengelola masjid mendorong dan menginginkan kehadiran profesi akuntan untuk mendisain penggunaan akuntansi yang baik dan benar dalam pengelolaan keuangan masjid agar dapat membantu perbaikan kinerja masjid dalam melakukan peran-peran dakwah dan pembangunan konstruksi sosial ditengah masyarakat Islam. Namun, persepsi individu akuntan yang berpikir sebagai akuntan *meanstream* yang kebanyakan tertarik mengembangkan diri dan akuntansi pada domain entitas *meanstream* yakni entitas komersial menjadi barrier pengembangan akuntansi pada entitas akuntansi yakni masjid.

Booth (1993) dalam Simanjuntak dan Januarsi (2011), dengan judul “Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Gereja”, Berdasarkan penelitian yang dilakukan tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Pemisahan kehidupan spiritual dan keduniawian menempatkan akuntansi sebagai ilmu yang didasari oleh pemahaman sekuler, menyebabkan institusi keagamaan seperti gereja, hanya mentolelir peran akuntansi pada batas mendukung kegiatan spritual, tidak terintegrasi dalam mendukung tugas-tugas suci keagamaan. Sebagai sebuah ilmu pengetahuan, akuntansi pada dasarnya adalah tools yang dapat mendukung kinerja entitas dimana akuntansi itu dipraktekkan.

Penelitian Peran dan praktek akuntansi pada entitas keagamaan seperti Gereja setidaknya lebih maju dibandingkan dengan penelitian pada entitas keagamaan lainnya.

Tabel 2.1 Ringkasan Hasil Penelitian Sebelumnya

| No | Nama dan Tahun | Judul Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|---|---|--|
| 1 | Sadjiarto, Arja (2000) | “Akuntabilitas Dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan” | Pemerintah diminta untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menilai apakah pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien dan efektif. Pengukuran kinerja dibagi dalam tiga kategori indikator, yaitu (1) indikator pengukuran <i>service efforts</i> , (2) indikator pengukuran <i>service accomplishment</i> , dan (3) indikator yang menghubungkan antara <i>efforts</i> dengan <i>accomplishment</i> . |
| 2 | Dahnil Anzar S, SE., ME. dan Mukhtar, SE., M.Si. (2010) | “Akuntansi Dan Pengelolaan Keuangan Di Masjid (Sebuah Studi Kasus)” | Dalam Konteks konstruksi budaya Masjid Baitusalam, akuntansi dapat diterima dengan baik sebagai instrumen yang penting bagi pengelolaan masjid sebagai bentuk perwujudan kejujuran dan pertanggungjawaban. Laporan keuangan masjid dilakukan sangat sederhana. <i>Clash Jurisdictional</i> tidak terjadi pada kasus Masjid Baitusalam, justru ustadz, agamawan yang mengelola masjid mendorong dan menginginkan kehadiran |

| | | | |
|---|--|--|--|
| | | | profesi akuntan untuk mendisain penggunaan akuntansi yang baik dan benar dalam pengelolaan keuangan masjid agar dapat membantu perbaikan kinerja masjid dalam melakukan peran-peran dakwah dan pembangunan konstruksi social ditengah masyarakat Islam |
| 3 | Dahnil Anzar Simanjuntak, Yeni Januarsi (2011) | “Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan di Masjid” | Dalam Konteks konstruksi budaya Masjid Baitusalam, akuntansi dapat diterima dengan baik sebagai instrumen yang penting bagi pengelolaan masjid sebagai bentuk perwujudan kejujuran dan pertanggungjawaban. Laporan keuangan masjid dilakukan sangat sederhana. <i>Clash Jurisdictional</i> tidak terjadi pada kasus Masjid Baitusalam, justru ustadz, agamawan yang mengelola masjid mendorong dan menginginkan kehadiran profesi akuntan untuk mendisain penggunaan akuntansi yang baik dan benar dalam pengelolaan keuangan masjid agar dapat membantu perbaikan kinerja masjid dalam melakukan peran-peran dakwah dan pembangunan konstruksi social ditengah masyarakat Islam |
| 4 | Booth (1993) dalam Simanjuntak dan Januarsi (2011) | “Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di Gereja” | Pemisahan kehidupan spiritual dan keduniawian menempatkan akuntansi sebagai ilmu yang didasari oleh pemahaman sekuler, menyebabkan institusi keagamaan seperti gereja, hanya mentolelir peran akuntansi pada batas |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>mendukung kegiatan spritual, tidak terintegrasi dalam mendukung tugas-tugas suci keagamaan. Sebagai sebuah ilmu pengetahuan, akuntansi pada dasarnya adalah tools yang dapat mendukung kinerja entitas dimana akuntansi itu dipraktekkan.</p> <p>Penelitian Peran dan praktek akuntansi pada entitas keagamaan seperti Gereja setidaknya lebih maju dibandingkan dengan penelitian pada entitas keagamaan lainnya.</p> |
|--|--|--|---|

Sumber : Berbagai jurnal yang dipublikasikan.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Akuntansi Syariah

Definisi bebas dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan definisi bebas dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia. Jadi, Akuntansi syari'ah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT (Wasilah dan Nurhayati, 2011:2) .

Transaksi syariah berlandaskan pada prinsip **Pertama**, Prinsip Persaudaraan (*ukhuwah*), merupakan bentuk interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dan saling tolong-menolong. Dalam transaksi syariah meliputi berbagai aspek, yaitu saling

mengenal, memahami, menolong, menjamin, dan saling berninergi. **Kedua**, Prinsip Keadilan (*'adalah*) artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu pada yang berhak dan sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam Usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang unsur riba, dzulm, maysir, gharar, ihtikar, najasy, risywah, ta'alluq, dan penggunaan unsur haram dalam barang dan jasa, maupun dalam aktivitas operasi. **Ketiga**, Kemaslahatan (*masalahah*); kemaslahatan harus memenuhi dua unsur, yaitu halal (sesuai dengan syariah) dan thayyib (bermanfaat dan membawa kebaikan). **Keempat**, Keseimbangan (*tawazun*); menekankan bahwa manfaat yang didapat dari transaksi syariah tidak hanya difokuskan pada pemegang saham, melainkan pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi. Dan **Kelima**, Universalisme (*syumuliyah*) artinya adalah transaksi syariah dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan sesuai dengan semangat rahmatan lil 'alamin (Riza, dkk 2009: 81-82) dalam (Putra, 2012).

2.2.2. Akuntansi dan Teologi

Triyuwono (2000) menyatakan, akuntansi dibentuk oleh lingkungannya melalui interaksi sosial yang kompleks (*complicated social interaction*), namun mengutip Sombart dalam Triyuwono (2000), ia dapat juga dapat berbalik mempengaruhi lingkungannya. Seperti yang disampaikan oleh Mathew dan Parera (1993) dalam Triyuwono (2000) menyatakan walaupun pandangan tradisional melihat bahwa akuntansi dibangun melalui interaksi sosial (*social constructed*) sebagai hasil dari

kejadian sosial, ekonomi, dan politik. Ini membuktikan bahwa akuntansi bukanlah suatu bentuk ilmu pengetahuan dan praktik yang bebas nilai (*value free*), tetapi sebaliknya ia adalah disiplin dan praktik dan sangat sarat dengan nilai.

Triyuwono (2000) menyatakan konsep akuntansi yang mengedepankan *enterprise theory* hanya memandang bahwa *income* yang diperoleh perusahaan merupakan hasil dari usaha kooperatif dari banyak partisipan (*stakeholders*). Oleh karena itu, *income* secara ideal didistribusikan kepada *stakeholders* atau konsep yang lebih luas menurut perspektif Islam menghendaki *income* harus didistribusikan kepada *stakeholders* dan *universe*, hal ini tidak dapat dilakukan oleh sifat egoisme seperti dalam *enterprise theory* tetapi dapat dilakukan apabila sifat *altruisme* atau mementingkan orang lain dari pada diri sendiri, dihadirkan dalam akuntansi seperti yang lazim berada dalam praktek teologi.

Akuntansi mainstream menurut Triyuwono (2000) sangat identik dengan angka- angka. Angka adalah “pusat”, tanpa angka, akuntansi menjadi suatu hal yang mustahil dan implikasinya adalah kita tidak dapat menggambarkan keadaan perusahaan atau entitas pelaporan lainnya. Mitologi angka-angka akuntansi yang juga ternyata merupakan sifat dari yang perlu di rekonstruksi, mengingat informasi kuantitatif tidak cukup memadai untuk memberikan gambaran yang relatif lebih utuh tentang keadaan entitas pelaporan. Dengan kata lain, informasi kualitatif yang selama ini dimarginalkan, perlu diangkat dan diposisikan sejajar dengan informasi kuantitatif.

Akuntansi adalah bagian dari ilmu dan praktik keduniawian yang terpisah dari kehidupan dan praktik maupun nilai keagamaan atau spiritual. (Laughlin, 1993) dalam (Simanjuntak dan Januarsi, 2011).

Eliade (1959) dalam Simanjuntak dan Januarsi (2011) menyatakan persepsi entitas keagamaan seperti Gereja didominasi oleh pemahaman bahwa akuntansi adalah praktik yang domain kerjanya hanya pada praktik keuangan yang berkarakteristik duniawi, sehingga entitas keagamaan menganggap disiplin ilmu ini tidak banyak dibutuhkan dalam kerja-kerja pelayanan di lembaga keagamaan.

2.2.3. Akuntabilitas dan Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas dapat dipandang dari berbagai perspektif. Dari perspektif akuntansi, *American Association* menyatakan bahwa akuntabilitas suatu entitas pemerintahan dapat dibagi dalam empat kelompok, yaitu akuntabilitas terhadap:

1. Sumber daya finansial
2. Kepatuhan terhadap aturan hukum dan kebijaksanaan administratif
3. Efisiensi dan ekonomisnya suatu kegiatan
4. Hasil program dan kegiatan pemerintah yang tercermin dalam pencapaian tujuan, manfaat dan efektivitas.

Sedangkan dari perspektif fungsional, akuntabilitas dilihat sebagai suatu tingkatan dengan lima tahap yang berbeda yang diawali dari tahap yang lebih banyak membutuhkan ukuran-ukuran obyektif (*legal compliance*) ke tahap yang membutuhkan lebih banyak ukuran-ukuran subyektif (Sadjiarto, 2000). Tahap-tahap tersebut adalah:

1. *Probity and legality accountability*

Hal ini menyangkut pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan anggaran yang telah disetujui dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*compliance*).

2. *Process accountability*

Dalam hal ini digunakan proses, prosedur, atau ukuran-ukuran dalam melaksanakan kegiatan yang ditentukan (*planning, allocating and managing*).

3. *Performance accountability*

Pada level ini dilihat apakah kegiatan yang dilakukan sudah efisien (*efficient and economy*).

4. *Program accountability*

Di sini akan disoroti penetapan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan tersebut (*outcomes and effectiveness*).

5. *Policy accountability*

Dalam tahap ini dilakukan pemilihan berbagai kebijakan yang akan diterapkan atau tidak (*value*).

Dari perspektif sistem akuntabilitas, terdapat beberapa karakteristik pokok sistem akuntabilitas ini yaitu :

1. Berfokus pada hasil (*outcomes*)
2. Menggunakan beberapa indikator yang telah dipilih untuk mengukur kinerja
3. Menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan atas suatu program atau kebijakan
4. Menghasilkan data secara konsisten dari waktu ke waktu

5. Melaporkan hasil (*outcomes*) dan mempublikasikannya secara teratur

Akuntabilitas publik adalah kewajiban penerima tanggung jawab untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat (*principal*). Akuntabilitas berbeda dengan konsep resposibilitas (Simanjuntak dan Januarsi, 2011).

Akuntabilitas dapat dilihat sebagai salah satu elemen dalam responsibilitas. Akuntabilitas juga berarti kewajiban untuk rnempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang. Sedangkan responsibilitas merupakan akuntabilitas yang berkaitan dengan kewajiban menjelaskan kepada orang atau pihak lain yang memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban dan member penilaian. Namun demikian, tuntutan akuntabilitas harus diikuti dengan pemberian kapasitas untuk melakukan keleluasaan dan kewenangan. Akuntabilitas public terdiri dari akuntabilitas *vertical* dan akuntabilitas *horizontal*. Akuntabilitas *vertical* adalah merupakan akuntabilitas kepada otoritas yang lebih tinggi, sedangkan akuntabilitas *horisontal* adalah akuntabilitas kepada publik secara luas atau terhadap sesama lembaga lannya yang tidak memiliki hubungan atasan bawahan. (Simanjuntak dan Januarsi, 2011).

Akuntabilitas kinerja ini dilakukan dengan memperhatikan indikator kinerja, yang merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan

mempertimbangkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), proses (*process*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*), dan dampak (*impact*).

1. *Input*, yaitu tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat atau besarnya sumber dana, sumber daya manusia, material, waktu, teknologi, dan sebagainya yang digunakan untuk melaksanakan program dan atau aktivitas.
2. *Output*, adalah tolok ukur kinerja berdasarkan produk (barang atau jasa) yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan masukan yang digunakan.
3. *Outcome*, adalah tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat keberhasilan yang dapat dicapai atas keluaran program atau aktivitas yang sudah dilaksanakan.
4. *Benefit*, yaitu tolok ukur kinerja berdasarkan tingkat kemanfaat yang dapat dirasakan sebagai nilai tambah bagi masyarakat dan Pemerintah daerah dari hasil.
5. *Impact*, adalah tolok ukur kinerja berdasarkan dampaknya terhadap kondisi makro yang ingin dicapai dari manfaat. (Nuraini dan Indudewi, 2010)

2.2.4. Laporan Keuangan dan Pelaporan Keuangan

Menurut Hanafi dan Halim (2002:63), dalam buku Analisis Laporan, Laporan Keuangan adalah laporan yang diharapkan bisa memberi informasi mengenai perusahaan, dan digabungkan dengan informasi yang lain, seperti industri, kondisi ekonomi, bisa memberikan gambaran yang lebih baik mengenai prospek dan risiko perusahaan.

Menurut Harahap (2006:105), dalam buku Analisa Kritis Atas Laporan Keuangan, laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan kondisi

keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Laporan Keuangan adalah :

1. Merupakan produk akuntansi yang penting dan dapat digunakan untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi bagi pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan.
2. Merupakan potret perusahaan, yaitu dapat menggambarkan kinerja keuangan maupun kinerja manajemen perusahaan, apakah dalam kondisi yang baik atau tidak.
3. Merupakan rangkaian aktivitas ekonomi perusahaan yang diklasifikasikan, pada periode tertentu.
4. Merupakan ringkasan dari suatu proses transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama periode yang bersangkutan.

Jenis laporan keuangan menurut Harahap (2004:106) yang berjudul " Analisis Kritis atas Laporan Keuangan" menyatakan : "Jenis laporan keuangan terdiri dari jenis laporan keuangan utama dan pendukung, seperti; Daftar Neraca, Perhitungan Laba Rugi, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana, Laporan Arus Kas, Laporan Harga Pokok Produksi, Laporan Laba Ditahan, Laporan Perubahan Modal, dan Laporan Kegiatan Keuangan."

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis laporan keuangan terdiri dari :

1. Neraca

Laporan keuangan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada waktu tertentu. Neraca menyajikan dalam data historikal aktiva yang merupakan sumber operasi perusahaan yang dijalankan, utang yaitu kewajiban perusahaan, dan modal dari pemegang saham perusahaan.

2. Laporan Laba Rugi

Laporan keuangan yang berisikan informasi tentang keuntungan atau kerugian yang diderita oleh perusahaan dalam satu periode tertentu. Pada laporan ini menyajikan data pendapatan sebagai hasil usaha perusahaan dan beban sebagai pengeluaran operasional perusahaan.

3. Laporan Perubahan Posisi Keuangan

Biasanya disebut daftar sumber dan penggunaan dana, menunjukkan asal kas diperoleh dan bagaimana digunakannya. Laporan perubahan posisi keuangan menyediakan latar belakang historis dari pola aliran dana. Laporan ini terbagi menjadi dua yaitu; Laporan Perubahan Modal Kerja dan Laporan Arus Kas. Laporan Perubahan Modal Kerja menyajikan data-data aktiva lancar dan utang lancar, sedangkan Laporan Arus Kas menyajikan data-data mengenai arus kas dari kegiatan operasional, kegiatan investasi, kegiatan keuangan/pembiayaan, dan saldo kas awal, serta saldo kas akhir.

4. Catatan dan laporan lain sebagai penjelasan bagi laporan keuangan

Catatan dan laporan lain merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dari laporan keuangan. Catatan-catatan ini tergantung pada kebijakan akuntansi yang digunakan pada waktu mempersiapkan laporan keuangan dan memberi tambahan detail mengenai beberapa bagian di laporan keuangan. Misalnya, Laporan Harga

Pokok Produksi, Laporan Perubahan Modal atau Laba Ditahan, Laporan Kegiatan Keuangan.

Laporan keuangan disusun dengan maksud untuk menyajikan laporan kemajuan perusahaan secara periodik. Manajemen perlu mengetahui bagaimana perkembangan keadaan investasi dalam perusahaan dan hasil-hasil yang dicapai selama jangka waktu yang diamati. Laporan kemajuan perusahaan tersebut pada hakikatnya merupakan kombinasi dari fakta-fakta yang telah dicatat (*recorded facts*), kesepakatan-kesepakatan akuntansi (*accounting conventions*), dan pertimbangan-pertimbangan pribadi (*personal judgments*). Pertimbangan atau pendapat pribadi berkaitan dengan kompetensi dan integritas pihak-pihak yang menyusun laporan keuangan, sedang kesepakatan akuntansi akan bersumber pada prinsip dan konsep akuntansi yang lazim diterima umum. Fakta-fakta yang telah dicatat (*recorded facts*) menunjuk pada data yang berasal dari catatan akuntansi (Jumingan 2006:6).

Tujuan utama laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi, menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Bentuk laporan keuangan ,laporan keuangan entitas syariah terdiri dari :

1. Posisi Keuangan Entitas Syariah, disajikan sebagai neraca.
2. Informasi Kinerja Entitas Syariah, disajikan dalam laporan rugi laba.

3. Informasi Perubahan Posisi Keuangan Entitas Syariah, yang dapat disusun berdasarkan definisi dana seperti seluruh sumber daya keuangan, modal kerja, asset likuid, atau kas.
4. Informasi lain, seperti Laporan Penjelasan tentang Pemenuhan Fungsi Sosial Entitas Syariah merupakan informasi yang tidak diatur secara khusus tetapi relevan bagi pengambilan keputusan sebagian besar pengguna laporan keuangan.
5. Catatan dan Skedul Tambahan, merupakan penampung dari informasi tambahan yang relevan termasuk pengungkapan tentang risiko dan ketidakpastian yang mempengaruhi entitas. (Nurhayati dan Wasilah 2011 : 95-96)

Karakteristik kualitatif laporan keuangan, karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok, yaitu : dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan (Nurhayati dan Wasilah 2011 : 96)

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam jurnaling (2006:5-6), laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban kepada pihak ekstern (luar perusahaan) harus disusun sedemikian rupa sehingga memenuhi keperluan untuk:

1. memberikan informasi keuangan secara kuantitatif mengenai perusahaan tertentu, guna memenuhi keperluan para pemakai dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi

2. menyajikan informasi yang dapat dipercaya mengenai posisi keuangan dan perubahan kekayaan bersih perusahaan
3. menyajikan informasi keuangan yang dapat membantu para pemakai dalam menaksir kemampuan memperoleh laba dari perusahaan
4. menyajikan informasi lain yang diperlukan mengenai perubahan dalam harta dan kewajiban, serta mengungkapkan informasi lain yang sesuai dengan keperluan para pemakai.

Pelaporan keuangan pemerintah pada umumnya hanya menekankan pada pertanggungjawaban apakah sumber daya yang diperoleh sudah digunakan sesuai dengan anggaran atau perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian pelaporan keuangan yang ada hanya memaparkan informasi yang berkaitan dengan sumber pendapatan pemerintah, bagaimana penggunaannya dan posisi keuangan pemerintah saat itu. Jika hal ini dikaitkan dengan, perspektif fungsional akuntabilitas, maka baru tahap *probity and legality accountability (compliance)* yang dipenuhi. Akuntabilitas pemerintahan di Indonesia baru sebatas tahap kepatuhan atau *compliance*. Harus di ingat, tahap ini barulah tahap awal dari lima tahap akuntabilitas sesuai perspektif fungsional. (Sadjiarto 2000).

2.2.5. Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi (SIA) adalah kumpulan sumberdaya, seperti manusia dan peralatan, yang diatur untuk mengubah data menjadi informasi. Informasi ini dikomunikasikan kepada beragam pengambil keputusan. SIA mewujudkan perubahan ini apakah secara manual atau terkomputerisasi (Bodnar dan Hopwood, 2000:1).

Istilah sistem informasi menganjurkan penggunaan teknologi computer di dalam organisasi untuk menyajikan informasi kepada pemakai. Sistem informasi "berbasis computer" merupakan sekelompok perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mengubah data menjadi informasi yang bermanfaat (Bodnar dan Hopwood, 2000:6).

Menurut Bodnar dan Hopwood (2000:6), Sistem Informasi Akuntansi, kita juga harus mendefinisikan sistem informasi akuntansi (SIA) sebagai sistem berbasis computer yang dirancang untuk mengubah data akuntansi menjadi informasi. Tetapi, istilah sistem informasi akuntansi lebih luas dari itu guna mencakup siklus-siklus pemrosesan transaksi, penggunaan teknologi informasi, dan pengembangan sistem informasi. Istilah sistem informasi akuntansi meliputi beragam aktifitas yang berkaitan dengan siklus-siklus pemrosesan transaksi perusahaan.

1. Siklus pendapatan.

Kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pendistribusian barang dan jasa ke entitas-entitas lain dan pengumpulan pembayaran-pembayaran yang berkaitan.

2. Siklus pengeluaran.

Kejadian-kejadian yang berkaitan dengan perolehan barang dan jasa dari entitas-entitas lain dan pelunasan kewajiban-kewajiban yang berkaitan.

3. Siklus produksi.

Kejadian-kejadian yang berkaitan dengan perubahan sumberdaya menjadi barang dan jasa.

4. Siklus keuangan.

Kejadian-kejadian yang berkaitan dengan perolehan dan manajemen dana-dana modal, termasuk kas.

Ada 3 fungsi utama dari sistem informasi akuntansi bagi perusahaan, yaitu:

1. Mengumpulkan dan menyimpan data dari semua aktivitas dan transaksi perusahaan.
2. Memproses data menjadi informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan yang memungkinkan bagi pihak manajemen untuk melakukan perencanaan, mengeksekusi perencanaan dan mengontrol aktivitas.
3. Menyediakan kontrol yang cukup untuk menjaga aset dari organisasi, termasuk data. kontrol ini memastikan bahwa data akan tersedia ketika dibutuhkan dan data tersebut akurat dan dapat dipercaya. (Romney dan Steinbart, 2000) dalam (Handoyo, dkk., 2014).

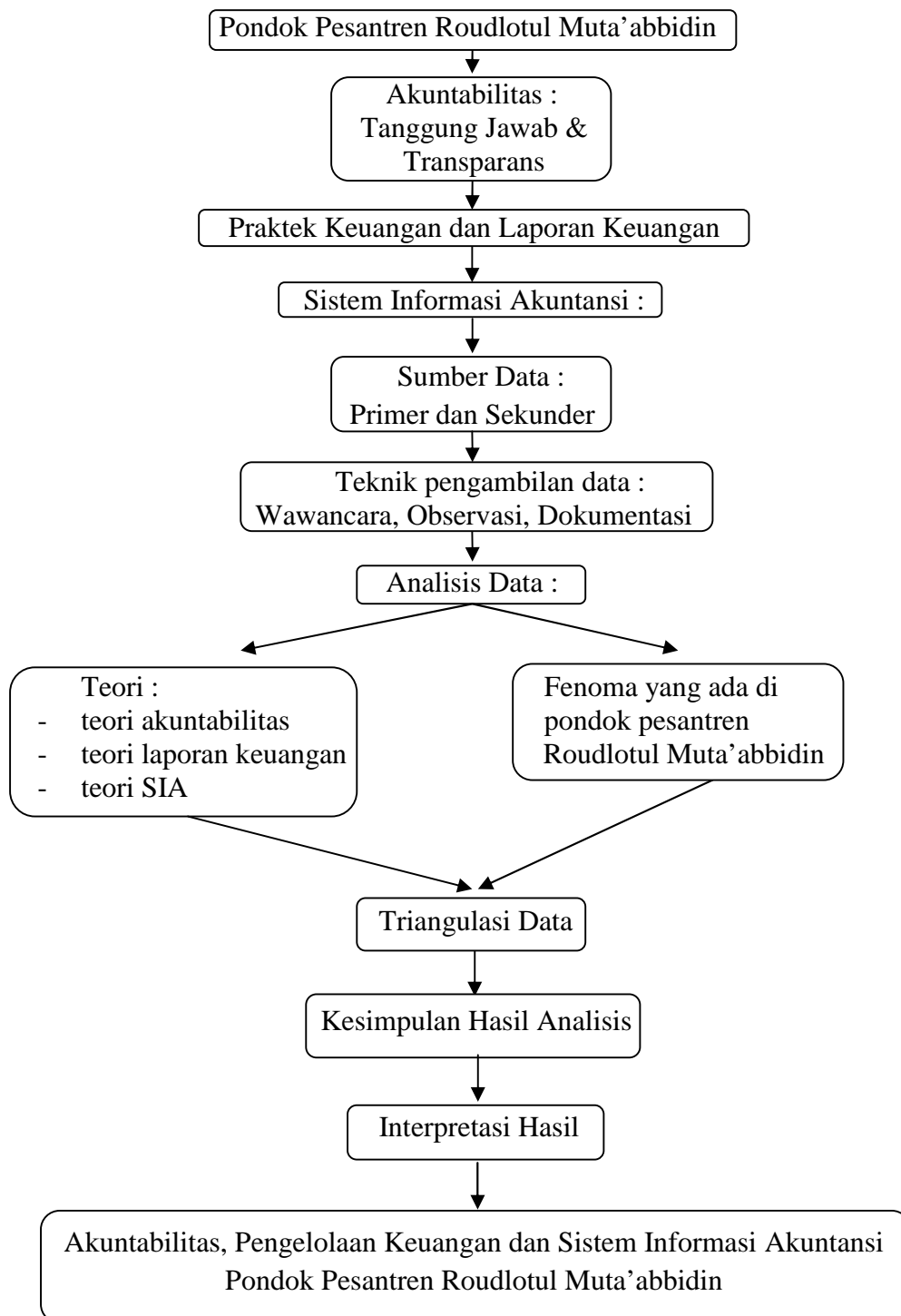
Salah satu tujuan dari pengembangan sistem informasi akuntansi adalah untuk menambah nilai bagi perusahaan. Sistem informasi akuntansi dapat memberi nilai bagi perusahaan dengan:

- a. Informasi yang akurat dan tepat waktu.
- b. Penerapan sistem informasi akuntansi yang meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya.
- c. Meningkatkan pengambilan keputusan yang tepat.
- d. Meningkatkan pembagian pengetahuan (*knowledge sharing*). (Romney dan Steinbart, 2000) dalam (Handoyo, dkk., 2014).

2.3 Proposisi dan Rerangka Konseptual

Berkaitan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka proposisi yang dapat ditarik pada penelitian ini adalah :

1. Akuntabilitas di Pondok Pesantren Roudlotul Muta'abbidin Payaman, Solokuro, Lamongan, dalam hal transparansi keuangannya masih belum dapat dinilai secara maksimal, belum efisien dan efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari salah satu faktor dari akuntabilitas yaitu kinerja para pengurus di Pondok Pesantren. Dalam hal ini berkaitan dengan keuangan yang belum transparan masih sebatas di kalangan pengurus saja yang mengetahuinya, tidak di publikasikan kepada seluruh pihak di Pondok Pesantren. Seperti pada akhir bulan, tidak dipublikasikannya sisa saldo keuangan Pondok Pesantren.
2. Pengelolaan keuangan di Pondok Pesantren Roudlotul Muta'abbidin Payaman, Solokuro, Lamongan masih manual, belum secara modern seperti pencatatan keuangan dengan menggunakan sistem komputer. Bentuk laporan keuangannya pun juga masih sederhana, hal itu di karenakan pemahaman para pengurus mengenai sistem komputerisasi masih minim, dan usia para pengurus juga menjadi faktor pengelolaan keuangan di Pondok Pesantren masih manual.
3. Penerapan Sistem Informasi Akuntansi di Pondok Pesantren Roudlotul Muta'abbidin Payaman, Solokuro, Lamongan, belum dapat diterapkan dengan baik. Dapat dilihat dari sistem pencatatan keuangannya, struktur kepengurusan dan struktur kegiatan masih belum terfasilitasi dengan baik.



Gambar : 2.1 Rerangka Konseptual Penelitian